# **DAFTAR ISI**

[**DAFTAR ISI** i](#_Toc373500665)

[**DAFTAR TABEL** iii](#_Toc373500666)

[**DAFTAR GAMBAR** iv](#_Toc373500667)

[**BAB I PENDAHULUAN** 1](#_Toc373500668)

[1.1. Latar Belakang 1](#_Toc373500669)

[1.2. Identifikasi Masalah 4](#_Toc373500670)

[1.3. Tujuan dan Kegunaan 4](#_Toc373500671)

[**BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS** 6](#_Toc373500672)

[2.1. Tinjauan Teoritis 6](#_Toc373500673)

[2.1.1. Pendapatan Asli Daerah 7](#_Toc373500674)

[2.1.2. Sumber Pendapatan Daerah 9](#_Toc373500675)

[2.1.3. Pajak Air Tanah 12](#_Toc373500676)

[2.2. Kebijakan Penggunaan Air Tanah 20](#_Toc373500677)

[2.3. Kebijakan Pengelolaan Air Tanah 21](#_Toc373500678)

[**BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI** 26](#_Toc373500679)

[3.1. Kerangka Pemikiran 26](#_Toc373500680)

[3.2. Kerangka Operasional 31](#_Toc373500681)

[3.3. Metode Penelitian 32](#_Toc373500682)

[3.4. Teknik Pengumpulan Data 35](#_Toc373500683)

[**BAB IV RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG** 36](#_Toc373500684)

[4.1. Profil Wilayah Kota 37](#_Toc373500685)

[4.2. Kedudukan Kota Bandung dalam Wilayah yang Lebih Luas 38](#_Toc373500686)

[4.3. Wilayah Administrasi 40](#_Toc373500687)

[4.4. Guna Lahan 44](#_Toc373500688)

[4.5. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia 48](#_Toc373500689)

[4.6. Potensi Ekonomi Wilayah Kota 51](#_Toc373500690)

[4.7. Sistem Penyediaan Air Minum 52](#_Toc373500691)

[**BAB V ANALISIS BESARAN PAJAK AIR TANAH** 54](#_Toc373500692)

[5.1. Penerimaan Pajak Air Tanah 54](#_Toc373500693)

[5.2. Proyeksi Penerimaan Pajak Air Tanah 56](#_Toc373500694)

[**BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI** 57](#_Toc373500695)

[6.1. Kesimpulan 57](#_Toc373500696)

[6.2. Rekomendai 58](#_Toc373500697)

# **DAFTAR TABEL**

[Tabel 3. 1 Rumus untuk Klasifikasi Jenis Pajak atau Retribusi Daerah 33](#_Toc373500636)

[Tabel 4. 1 Hirarki Kota PKN Metropolitan Bandung 39](#_Toc373500641)

[Tabel 4. 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung 41](#_Toc373500642)

[Tabel 4. 3 Pembagian Wilayah Kota Bandung 43](#_Toc373500643)

[Tabel 4. 4 Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2008 45](#_Toc373500644)

[Tabel 4. 5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung 1990-2008 48](#_Toc373500645)

[Tabel 4. 6 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Domestik di Kota Bandung 2009-2031 52](#_Toc373500646)

[Tabel 4. 7 Ketersediaan Air dan Rencana Pengembangan Sumber Air Baku Di Cekungan Bandung 53](#_Toc373500647)

# **DAFTAR GAMBAR**

[Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran 30](#_Toc373500557)

[Gambar 4. 1 Sebaran Kegiatan Ekonomi di Kota Bandung 51](#_Toc373500566)

# **BAB I PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Pembangunan yang pesat pada era kontemporer saat ini pada kelanjutannya berdampak pada ketersediaan sumber daya air, terutama sumber daya air bawah tanah, karena sumber daya air bawah tanah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan rumah tangga sehari-hari lebih bergantung kepada air bawah tanah dibandingkan pada air permukaan. Demikian pula halnya pada sektor industri yang banyak bergantung pada air bawah tanah.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, urusan pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sehingga semua program pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup menjadi beban APBD dari daerah yang bersangkutan.

APBD diantaranya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari hasil pungutan pajak daerah. Pajak pemanfaatan dan pengambilan air tanah merupakan pajak daerah yang telah digolongkan menurut UU No 28 tahun 2009.

Secara teoritis prinsip pemungutan pajak, pertama adalah berdasarkan prinsip keadilan, dimana semua masyarakat/penduduk merasakan suatu keadilan dan mendapatkan porsi yang adil merata secara keseluruhan. Pajak yang dikenakan bagi masyarakat dikenakan dengan adil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Kemudian yang kedua prinsipkepastian, dimana wajib pajak mengetahui dengan pasti berapakah besaran pengenaan pajaknya, objek-objek yang dikenakan pajak, kapan harus dibayar dan tarif pengenaan pajaknya. Hal ini berhubungan dengan undang-undang yang mengaturnya. Jadi, pajak yang dikenakan oleh pemerintah harus dengan pasti berdasarkan pada undang-undang mengenai ketentuannya. Yang ketiga adalah prinsip kenyamanan, dalam hal ini memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Terakhir adalah prinsipefisien. Dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah daerah harus efisien atau hemat. Prinsipnya adalah besarnya biaya dalam memungut pajak tidak melebihi penghasilan dari pajak yang diperoleh.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Kota Bandung yang dinamis, maka perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai, termasuk didalamnya pelayanan pengadaan air bersih. Kota Bandung berkembang terus, sama halnya dengan permintaan pengadaan air bersih. Di sisi lain terdapat keterbatasan kemampuan pengadaan air bersih oleh PDAM, karenanya peningkatan penggunaan air tanah sebagai salah satu solusi.

Berdasarkan kenyataan, air bawah tanah masih merupakan andalan utama sebagai sumber air bersih bagi masyarakat baik untuk keperluan rumah tangga sederhana yang bersifat tidak komersial maupun untuk keperluan komersial misalnya industri, perhotelan, perkantoran umum atau perdagangan, pemukiman mewah atau apartemen, pertanian, perikanan, peternakan, dll.

Peningkatan pengambilan air bawah tanah lama kelamaan akan menimbulkan dampak lingkungan. Di daerah perkotaan dan kawasan industri pengambilan air bawah tanah dengan intensitas tinggi mengakibatkan berkurangnya sumberdaya air bawah tanah sehingga sering menimbulkan konflik pengambil air bawah tanah.

Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Penggunaannya sangat diminati dikarenakan kemudahan mendapatkannya baik dengan pengeboran ataupun penggalian. Namun disisi lain pemanfaatan yang terlalu berlebihan dan terus menerus dapat berdampak pada ambles tanah, ambles ruas jalan, kemunculan rongga di gedung, serta makin besarnya beban tanah akibat berat bangunan yang mendorong terjadinya pemadatan lapisan tanah.

Secara alami air bawah tanah tidak dibatasi oleh batas wilayah administrasi maupun batas kepemilikan lahan, sehingga air bawah tanah merupakan sumber daya alam milik bersama artinya pengambilan di suatu tempat akan berpengaruh pada tempat lain disekitarnya. Karena besarnya pengambilan air bawah tanah tidak sama, maka demi keadilan pengambil dengan volume yang lebih besar pada prinsipnya harus memberikan kompensasi kepada pengambil yang volume pengambilannya lebih kecil. Kompensasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Undang-undang No.28 tahun 2009 menjelaskan tentang jenis-jenis pajak daerah dimana salah satunya mengenai Pajak Air Tanah. Pemungutan pajak tidak hanya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap wajib pajak dan masyarakat secara keseluruhan atas potensi dan kekayaan alam yang ada.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun maksud dari kajian penyelenggaraan pajak air tanah di Kota Bandung dalam hal ini sebagai bahan evaluasi bagi DPRD Bandung dalam rangka penanganan dan penataan pemanfaatan air tanah dengan cara membandingkan kondisi di lapangan dengan kebijakan dan peraturan yang ada serta melihat praktik pemanfaatan air tanah daerah lain baik.

## Identifikasi Masalah

Permasalahan utama dalam kajian ini adalah indikasi semakin meningkatnya maraknya pemanfaatan air tanah, sementara penataannya kurang mempertimbangkan kondisi lingkungan dan RTRW, sehingga perlu dikaji dan dievaluasi kembali apakah sesuai dengan kaidah keseimbangan alam.

1. Lokasi dalam kaitan tata ruang kota (RTRW) yang tidak tepat
2. Keberadaan sumur air tanah dalam volume/kualitas dalam lingkungan yang berlebihan.
3. Potensi kontribusi pajak air tanah terhadap PAD yang belum Optimal

## Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari kajian penyelenggaran pajak air tanah Kota Bandung adalah untuk dapat menata kota supaya lebih baik, dengan cara memperbaiki penataan lokasi sumur resapan dan mencari solusinya, sehingga aspek lingkungan Kota Bandung akan tercapai sesuai dengan Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat, termasuk melihat kontribusi pajak air tanah terhadap PAD Kota Bandung.

Melalui pelaksanaan efektif dari tujuan tersebut diharapkan kegunaan dari penyelenggaraan pajak air tanah dapat terealisasi yaitu terdapatnya hasil kajian dan evaluasi penanganan dan penataan pemanfaatan sumur air tanah di Kota Bandung sebagai bahan masukan bagi DPRD kota Bandung dalam pengambilan kebijakannya, dengan melakukan:

1. Mengidentifikasi relevansi dan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung dalam pemanfaatan sumur air tanah.
2. Mengidentifikasi permasalahan dilapangan mengenai pemanfaatan sumur air tanah di Kota Bandung.
3. Mengidentifikasi permasalahan pendapatan daerah dari sumur air tanah.
4. Mengevaluasi kebijakan dan peraturan pemanfaatan sumur air tanah yang ada di Kota Bandung.
5. Merencanakan Penanganan dan Penataan pemanfaatan sumur air tanah yang sesuai lingkungan dan peraturan yang ada di Kota Bandung.
6. Menyesuaikan penataan pemanfaatan sumur air tanah sesuai dengan RTRW Kota Bandung.
7. Melakukan studi banding dengan daerah lainnya mengenai praktik dan aturan penyelenggaraan pemanfaatan sumur air tanah.

Manfaat akhir dari kajian penyelenggaran pajak air tanah Kota Bandung dimaksud tidak lain merupakan bahan masukan bagi DPRD Kota Bandung dalam pengambilan kebijakan mengenai penanganan penyelenggaran pemungutan pajak air tanah.

# **BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS**

## Tinjauan Teoritis

Upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. upaya pemerintah daerah melalui cara intensifikasiadalah (Machfud Sidik, 2002):

1. Memperluas basis penerimaan yaitu: tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yangdapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggappotensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial danjumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan, yaitu: upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara laindengan mempercepat penyusunan Peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan, yaitu: hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, yaitu: tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, yaitu: hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Sedangkan upaya pemerintah daerah mengoptimalisasi pemungutan pajak daerah melalui cara ekstensifikasi pajak adalah melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan wewenang perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

### Pendapatan Asli Daerah

Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 membawa angin segar terhadap demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah, yaitu adanya kewenangan yang semakin besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan dalam menentukan anggaran. Implikasi positifnya, bahwa kewenangan penyusunan anggran program kegiatan yang aspiratif bagi masyarakat dan disesuaikan dengan potensi yang ada.

Oleh karena itu, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, maka anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat *(client centered)*, yang menuntut transparasi informasi anggaran kepada publik dan termuat dalam laporan keuangan daerah.

Secara empiris diketahui, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan (khususnya dalam rangka otonomi daerah) terdapat kontradiksi, yaitu disatu pihak asas desentralisasi mempunyai konsekuensi adanya penyerahaan urusan kepada daerah kabupaten/daerah kota tetapi dilain pihak kewenangan untuk mengoptimalkan kemampuan keuangan (khususnya PAD) tidak semuanya diberikan pada daerah, sekalipun ada berbagai perubahan pembagian penerimaan sebagai *political will* dari pemerintah pusat. Namun demikian kemampuan keuangan daerah pada umumnya masih sangat rendah.

Permasalahan pokok dalam mewujudkan kemandirian pemerintah Kota/Kabupaten, dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam membiayai sendiri jalannya roda pembangunan di daerahnya, atau dengan kata lain dapat dilihat dari ratio PAD terhadap APBD. Pada umumnya menunjukkan bahwa rata-rata besarnya kontribusi PAD terhadap APBD hanya berkisar 20%.

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan untuk mewujudkan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawab.

Dasar hukum Pendapatan Daerah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2).
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain

### Sumber Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
   * 1. Hasil Pajak Daerah.
     2. Hasil Retribusi Daerah.
     3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan.
     4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu:
3. Dana Bagi Hasil yaitu, dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta penerimaan dari sumber daya alam.
4. Dana alokasi umum.
5. Dana alokasi khusus
6. Pinjaman Daerah, yaitu:
7. Pemerintah
8. Pemerintah Daerah lain
9. Lembaga Keuangan Bank
10. Lembaga Keuangan Bukan Bank
11. Masyarakat
12. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Antara lain: hibah dan pendapatan dana darurat.

Dengan demikian pendapatan daerah, diperoleh daerah sebagai hasil dari:

* 1. Pendapatan Asli Daerah sendiri
  2. Pendapatan berasal dari Pemerintah
  3. Lain-lain pendapatan yang sah, yang digunakan untuk membiayai pengaturan dan pengurusan daerah setempat

Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi daerah, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan [daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) untuk membiayai semua [pengeluaran](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1) termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak daerah mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

* Fungsi anggaran (*budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan [daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara), pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. [Biaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya) ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Dewasa ini pajak daerah digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja [pegawai](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai), belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, [uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Uang) dikeluarkan dari [tabungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan) pemerintah daerah, yakni penerimaan daerah dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah daerah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak daerah.

* Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman [modal](http://id.wikipedia.org/wiki/Modal), baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

* Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga [inflasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi) dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

* Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh pemerinta daerah akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat).

Praktik pengelolaan Pajak Air bawah tanah di Kota Bandung diharapkan dapat meningkat kinerjanya dari waktu ke waktu. Peningkatan kinerja pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah akan memberikan dampak ganda, yakni pada satu sisi meningkatkan kepuasan masyarakat luas atas kenyamanan dalam pelayanan pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah dan disisi lain dapat mengoptimalkan kinerja penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Pemerintah Kota Bandung.

Kondisi saat ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Bandung cukup baik dengan fakta bahwa penerimaan pajak hingga mendekati akhir kuartal pertama tahun 2013 telah hampir mencapai target yang diharapkan. Berkaca bahwa tahun 2013 adalah tahun perdana dikelolanya Pajak Air Bawah Tanah oleh pemerintah Kota Bandung, maka pencapaian ini cukup memuaskan, tetapi tentunya masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Kota Bandung terkait :

1. Penguatan Peraturan dan Regulasi teknis yang mendasari pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah Kota Bandung masih belum lengkap dan cukup mengatur secara baik.
2. Perlunya pembuatan SOP teknis Pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah yang merujuk pada aspek *best practice* yang telah dilakukan atau berdasarkan pendekatan GCG.
3. Peningkatan pemahaman dan kualitas SDM yang akan menjadi pelaksana teknis dari pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah.

### Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaaatan Air Tanah dan Air Permukaan (PPPAABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak Pemerintah. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPATBTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah, di mana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak Pemerintah sedangkan Pajak Air Tanah Ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

Pengenaan Pajak Air Tanah tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena ini untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peratursan daerah tentang Pajak air Tanah yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak air Tanah di daerah kabuaten/kota yang bersangkutan.

Untuk mencegah kevakuman hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pada tanggal 1 Januari 2010, pemungutan Pajak Air Tanah pada suatu kabupaten/kota masih dapat dilakukan meneruskan pemungutan PPPABTAP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasa 108 ayat 3 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Pemerintah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama satu tahun sejak diberlakukannya Undang-Undag Nomor 28 Tahun 2009, sepanjang peraturan daerah kabupaten/kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009. Hal ini berarti sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah oleh pemerintah kabupaten/kota, Pajak Air Tanah masih menjadi bagian dari PPPABTAP yang dipungut oleh pemerintah Pemerintah yang bersangkutan. Hanya saja dalam jangka waktu satu tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan pemerintah kabupaten/kota yang ingin memungut Pajak Air Tanah harus telah menetapkan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Air Tanah pada kanupaten/kota tersebut.

#### Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Tanah

Pemungutan Pajak air Tanah di indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Tanah pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan daerah kabupaten/kota yan mengatur tenang PPPABTAP, yang dinyatakan berlaku paing lambat satu tahun setelah berlakunya Undang-Udang Nomor 28 Tahun 2009, sepanjang peraturan daerah kabupaten/kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukannya berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PPPABTAP sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PPPABTAP, dengan memerhatikan ketentuan pada nomor 2 di atas.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Air Tanah
5. Keputusan bupati/walikoa yang mengatur tentang Pajak Air Tanah sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah pada kabupaten/kota dimaksud.

Berdasarkan undang-undang No.28 tahun 2009 tersebut, Pajak Air Bawah tanah Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas air bawah tanah yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pengertian air bawah tanah menurut UU No.28 Tahun 2009 yaitu: Air bawah tanah ialah Sumber air yang berasal dari dalam tanah yang berasal dari resapan air yang berasal baik dari hujan maupun aliran air bawah tanah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pemerintah kabupaten/kota bersama dengan DPRD kabupaten/kota diharapkan dapat segera membahas dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Air Tanah. Dengan demikian, satu tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah tentang PPPABTAP tidak lagi dijadikan dasar hukum pemungutan Pajak Air Tanah di kabupaten/kota dimaksud.

#### Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah . Air Tanah adalah air yang teradapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.

Pada Pajak Air tanah tidak semua pemgambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak. Dikesualikan dari objek Pajak air Tanah adalah kegiatan di bawah ini.

1. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
2. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya pengambilan air tanah yang diatur dengan peraturan daerah. Misalanya pengambilan air tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, riset atau penelitian, dan sebagainya.

#### Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah

Subjek pajak pada pengenaan Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukam pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dengan demikian, pada pengenaan Pajak Air Tanah, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

Dalam menjalankan kewajiban perpajaknnya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Perturan Daerah tentang Pajak Air Tanah. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara proibadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk serang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuihi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilhat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

#### Izin Pengambilan Air Tanah

Dalam rangka pengendalian pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pengaturan dan pemberian izin bagi orang atau badan yang akan mengambil dan atau memanfaatkan air tanah. Untuk itu pemerintah daerah dapat menetapkan air tanah. Untuk itu pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan yang menentukan bahwa setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan diwatering,dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari bupati/walikota. Izin tersebut terdiri dari izin pengeboran air tanah dan izin pemanfaatan air tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali. Demi kepastian hukum dan memudahkan pengawasan maka izin yang diberikan oleh bupati/walikota tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota. Selain itu, perubahan izin pemanfaatan air tanah harus dengan persetujuan tertulis dan bupati/walikota.

Permohonan untuk mendapatkan izin pengeboran air tanah harus disampaikan secara tertulis kepada bupati /walikota dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah atauk bupati/walikota. Umumnya izin pemanfaatan air tanah diberikan oleh bupati/walikota setelah hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air tanah berdasarkan kebutuhan yng bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan daerah tentang izin pemanfaatan air tanah dapat menetapkan izin pemanfaatan air tanah tidak diperlukan dalam hal pengambilan air dilakukan untuk keperluan:

1. Air minum dan atau dasar rumah tangga;
2. Penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah atau swasta yang telah mendapat pengakuan pemerintah dengan memberikan laporan penelitian kepada gubernur; dan
3. Rumah ibadah, panti asuhan, dan bangunan sosial.

Setiap pengambilan air tanah yang telah mendapatkan izin wajib dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur luah (debit) air yang diambil dalam satuan meter kubik (m3), yang disediakan oleh pemerintah daerah. Izin pengeboran air tanah diberikan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu tiga tahun, dan hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan. Izin pengeboran air tanah dan izin pemanfaatan air tanah dapat diperpanjang atas permohonan . Izin pengeboran air tanah dan izin pemanfaatan air tanah dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin. Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pemegang izin. Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin serta perpanjangan izin pemanfaatan air tanah ditetapkan oleh bupati/walikota.

Izin pemanfaatan air tanah dapat dicabut apabila:

1. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan sejak zona dikeluarkan;
2. Kualitas air tidak memenuhi persyaratan;
3. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
4. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup; dan
5. Atas dasar permintaan pemegang izin

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan pajak Air Tanah

1. **Dasar Pengenaan Paka Air Tanah**

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah *Nilai Perolehan Air Tanah* (NPAT). NPAT dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

1. Jenis sumber air;
2. Lokasi sumber air;
3. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
4. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan;
5. Kualitas air; dan
6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan.

Penggunaan faktor-faktor di atas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota yang menerapkan pajak air tanah. Besarnya NPAT ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Cara menghitung nilai perolehan air adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD dan memerhatikan faktor-faktor di atas. Harga dasar air yang ditetapkan oleh bupati/walikota dapat mengacu antara lain pada tarif air yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

1. **Tari Pajak Air Tanah**

Tarif Pajak Ait Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen.

1. **Perhitungan Pajak Air Tanah**

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang terutama dihitung dengan cara mengalikan tarif tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Air Tanah adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Tanah

## Kebijakan Penggunaan Air Tanah

Pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Pemerintah Kota Bandung diduga telah sampai pada tahap yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan muka air tanah (Tresnadi, 2007), amblesan (Djaja et.al., 2004 dan Abidin et.al., 2009) dan intrusi air laut (Schmidt, et.al. 1990 dan Delinom, 2008). Berbagai laporan dan hasil penelitian, antara lain Jakarta Dalam Angka 2006-2008 (BPS Pemerintah Jakarta, 2006, 2007 dan 2008), Syaukat dan Fox (2004) menunj ukkan beberapa faktor atau penyebab terjadinya kecenderungan untuk pemanfaatan air tanah di Pemerintah Kota Bandung, yaitu: (1) harga perolehan air tanah yang jauh lebih murah dibandingkan tarif pemakaian air Perusahaan Air Minum (PAM) Kota Bandung; (2) cakupan pelayanan PAM Kota Bandung yang relatif belum mencukupi; (3) pemompaan air tanah sifatnya in-situ sehingga ketersediaannya tidak tergantung pihak lain dan membuat ketersediaan air lebih terjamin; (4) rejim pengelolaan air tanah yang secara “de facto” merupakan “open access”; (5) implementasi dan penegakan peraturan perundangan yang masih bel um optimal.

Mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah tidak selalu menghasilkan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien, khususnya untuk mengelola barang-barang publik termasuk air tanah. Mekanisme pasar akan berjalan efektif dan efisien jika diberlakukan pada barang-barang privat murni (pure private goods) dan tidak terdapat asimetri informasi. Untuk barang-barang dan jasa-jasa yang tidak sepenuhnya merupakan barang privat murni, seringkali terjadi apa yang disebut sebagai kegagalan pasar, demikian juga jika terdapat asimetri informasi.

Di semua negara, alokasi sumber daya tidak sepenuhnya diatur melalui mekanisme pasar tetapi juga terdapat campur tangan pemerintah melalui apa yang disebut sebagai kebijakan atau kebijakan publik. Seperti mekanisme pasar, tidak seluruhnya kebijakan pemerintah membuat alokasi menjadi lebih efisien dan efektif, seringkali yang terjadi malah sebaliknya. Situasi ini dikenal sebagai kegagalan pemerintah.

## Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Kebijakan nasional yang secara eksplisit berkaitan dengan air tanah dan masih berlaku sampai saat ini adalah: (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU 7/2004); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (PP 43/2008); dan (3) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 145 1K/10/MEM/2000 (Kepmen 145 1K/2000). Peraturan perundangan lain yang terkait dengan pajak dan retribusi air tanah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 2 8/2009).

Undang-undang yang pertama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU 11/1974). Salah satu pertimbangan dibuatnya undang-undang tersebut adalah Algemeen Wattereglement Tahun 1936 pada dasarnya tidak berlaku untuk seluruh Indonesia, hanya mengatur masalah sumber daya air khususnya masalah irigasi di Jawa dan Madura. Pertimbangan lainnya adalah ketentuan-ketentuan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pengairan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini. Undang-undang tersebut mengacu pada konstitusi UUD 1945, sehingga menempatkan sumber daya air dikuasai negara, atau secara lebih tegas milik negara. Dalam pasal 1 tentang pengertian tidak dibuat ayat khusus tentang air tanah, hanya dimasukkan dalam ayat yang mendefinisikan pengertian air (ayat 3) dan sumber-sumber air (ayat 4). Undang-undang tersebut secara eksplisit sudah mengatur masalah konservasi, preservasi, dan pengusahaan air.

Tahun 2004 dibuat undang-undang baru menggantikan UU 11/1974, yakni UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan pengertian air tanah secara eksplisit. Selain itu dalam pasal-pasal yang lain diatur tersendiri tentang air tanah. Salah satu latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini adalah adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang semakin menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat.

Menurut UU 7/2004, sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya (pasal 1), sedangkan air terdiri dari air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat (pasal 2). Pada dasarnya undang-undang tersebut mengatur masalah pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air adalah pelaksanaan fungsi manajemen untuk penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air (pasal 7). Pengambilan dan pemanfaatan air tanah termasuk dalam kegiatan pendayagunaan sumber daya air. Secara implisit, UU 7/2004 memuat ketentuan tentang pengelolaan air tanah secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut undang-undang ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (PP 43/2008). Dalam peraturan pemerintah ini secara rinci dijelaskan tentang kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air, yakni kebijakan nasional sumber daya air, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Pemerintah, dan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota. Bentuk kongkrit dari integrasi tersebut adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional yang dikeluarkan oleh menteri, kebijakan teknis air pengelolaan tanah tingkat Pemerintah yang dikeluarkan oleh gubernur, dan kebijakan teknis pengelolaan air tanah tingkat kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.

Strategi pengelolaan air tanah yang dimaksudkan dalam PP 43/2008 merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah. Strategi ini disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, lintas Pemerintah, lintas negara, dan strategis nasional.

Kepmen 1451 K/2000 pada dasarnya merupakan pedoman teknis berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang seharusnya dijadikan acuan oleh DPRD dan pemerintah kabupaten/kota yang menerbitkan kebijakan pengelolaan air tanah di wilayahnya. Keputusan menteri ini memiliki 11 lampiran yang menjelaskan secara teknis segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah, yakni: (1) pedoman teknis evaluasi potensi air tanah; (2) pedoman teknis perencanaan pendayagunaan air tanah; (3) pedoman teknis penentuan debit pengambilan air tanah; (4) prosedur pemberian izin eksplorasi air tanah; (5) prosedur pemberian izin pengeboran dan izin pengambilan air tanah; (6) prosedur pemberian izin penurapan dan izin pengambilan mataair; (7) prosedur pemberian izin perusahaan pengeboran air tanah; (8) prosedur pemberian izin juru bor air tanah; (9) pedoman teknis pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi air tanah; (10) pedoman teknis penentuan nilai perolehan air dari pemanfaatan air tanah dalam perhitungan pajak pemanfaatan air tanah; dan (11) pedoman pelaporan pengambilan air tanah.

# **BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI**

## Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah dearah haruslah berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian atas pungutan daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambunag tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Hasil (Yield), yaitu memadai tidak nya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dendgan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertambahan penduduk, pertambahan pendapatan dan sebagainya.
2. Keadilan (Equility)

Dalam hal ini dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang;pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumberdaya yang lebih besar; dan pajak/retribusi haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

1. Efisiensi ekonomi

Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidak-tidak nya tidak mengambat penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi;mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung;dan memperkecil”beban lebih” pajak.

1. Kemampuan melaksanakan (Ability to implement)

Dalam hal ini suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupin administratif.

1. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Suitability as lical revenue source) ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mepertajam perbedaan-perbedaan antar daerah segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan, (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber sumber penerimaan PAD.

Beberapa variabel yang perlu di analisa untuk mengetahi potensi sumber-sumber PAD adalah:

1. Kondisi awal suatu daerah.

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangalah menentukan, yakni:

1. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntunan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pada masyarakat agraris (berbasis pertanian)misalnya, tuntunan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu akan lebih rendah dari pada tuntunan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Pada masyarakat agraris, pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara dalam masyarakat industri pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntunan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik.
2. Karena perbedaan pada struktur ekonomi dan sosialnya, kemampuan membayar segala pungutan yang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris. Kondisi awal suatu daerah mencakup pengetahuan tentang:

* Komposisi industri yang ada di daerah
* Struktur sosial. Politik, dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan
* Kemampuan (kecakapan) administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah.
* Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan Indikator untuk mengetahui kondisi awal suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah.

1. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensfikasi penerimaan PAD. Kegiatan in merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, yaitu:
2. Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi.

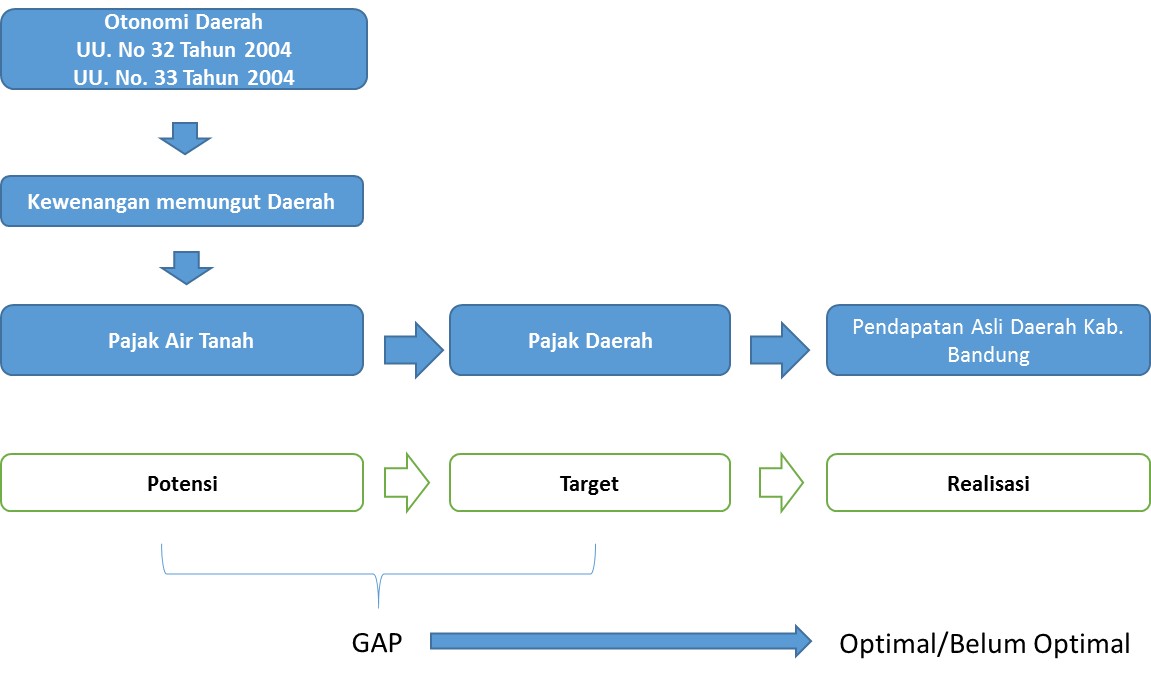
Peningkatan cakupaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan subjek pajak dan atau retribusi daerah

1. Meningkatkan besarnya penetapan.

Dalam penelitian potensi Pendapatan Asli Daerah, pelu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak atau retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Untuk meningkatkan cakupan , perlu dideteksi kemungkinan adanya kebocoran dan mengevaluai kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi

1. Mengurangi tunggakan.

Peningkatan cakupan dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemerikasaan terhadap tunggakan rekening. Kemudian di ambil langkah-langkah konkrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadi nya tunggakan baru.



Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran

Air tanah adalah salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Cadangan air tanah di dunia cenderung menurun, karena meskipun merupakan sumber daya alam yang bisa pulih tetapi memiliki kecenderungan mengalami deplesi (Hartwick dan Olewiler (1998), Koundouri (2004), dan Tietenberg (2006)), karena laju ekstrasi lebih besar dari laju pengimbuhan. Pada umumnya air tanah adalah sumber daya yang dimiliki negara, tetapi secara “de facto” rejim pengelolaannya adalah “open access” karena pengambilan air tanah bisa dilakukan diatas lahan yang dilindungi oleh hak milik perorangan atau badan. Pada situasi seperti ini diperlukan peran pemerintah dalam bentuk formulasi dan implementasi kebijakan untuk membatasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Koundouri (2004) menyatakan tanpa kebijakan dapat terjadi kesalahan alokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Pajak dan retribusi merupakan instrumen yang banyak dipakai untuk membatasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Berbagai literatur juga banyak membahas dan merekomendasikan instrumen ini, misalnya Sterner (2003) dan Kemper et.al. (2006), meskipun meskipun tidak selalu lebih baik (Hellegers dan van Ierland, 2003). Akurasi penggunaan instrumen pajak dan retribusi sangat tergantung pada seberapa tepat penetapan perhitungan harga air tanah. Penetapan harga air tanah pada umumnya hanya didasarkan pada biaya ekstrasi, tidak memasukan nilai kelangkaan sumber daya air tanah. Konsep dan praktik seperti ini menyebabkan harga air tanah menjadi lebih rendah dibandingkan harga semestinya (Howe (1979), Moncur dan Pollock (1988), Koundouri (2004), dan Grafton et.al. (2004)).

Alokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah harus didasarkan pada analisis dinamik. Penetapan jangka waktu (time horizon) pengambilan air tanah dan penetapan discount rate, pertimbangan hidrologis terkait laju pengimbuhan harus menjadi pertimbangan utama untuk melakukan alokasi dinamik. Output alokasi dinamik memungkinkan – dan seharusnya seperti itu – terjadi perbedaan besaran harga dasar air di berbagai lokasi pengambilan dan pemanfaatan air dalam satu wilayah administrasi pemerintahan. Dengan demikian dimungkinkan terjadi perbedaan penetapan besaran pajak air tanah dalam satu satuan wilayah administrasi.

## Kerangka Operasional

Prioritas pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Bandung bersumber dari air permukaan yang disediakan oleh PAM Kota Bandung. Prioritas ini sulit diwujudkan karena: (a) harga perolehan air tanah lebih murah dibandingkan dengan tarif air bersih PAM Kota Bandung; (b) cakupan pelayanan PAM Kota Bandung tidak memadai karena pertumbuhan kapasitas produksi relatif tetap sementara permintaan terus meningkat; (c) kelemahan penegakan peraturan menyebabkan rejim pengelolaan air tanah yang pada dasarnya merupakan sumber daya milik negara secara de facto merupakan open acces (Syaukat dan Fox (2004)).

Pemanfaatan dan pengambilan air tanah di Pemerintah Kota Bandung diduga telah sampai pada tahap yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan muka air tanah, intrusi air laut dan amblesan (Schmidt et.al. (1990), Djaja et.al. (2004), Tresnadi (2007), Delinom (2008), dan Abidin et.al. (2009)). Sterner (2003) menyatakan masalah kelangkaan air tanah disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena kesalahan alokasi atau penggunaan, dan lemahnya manajemen dan peraturan yang terkait dengan pengambilan air tanah.

Kebijakan pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Pemerintah Kota Bandung saat ini perlu diperbarui, khususnya disesuaikan dengan kebijakan nasional pengelolaan air tanah yang diterbitkan setelahnya. Salah satu kebijakan yang baru dikeluarkan adalah menaikkan NPA (nilai perolehan air tanah) sebagai dasar penetapan besaran pajak air tanah. Pajak air tanah adalah perkalian tarif pajak dengan NPA. Kewenangan menetapkan tarif pajak air tanah ada pada pemerintah pusat, yakni maksimal sebesar 20% seperti termaktub dalam undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kenaikan NPA ini diharapkan menurunkan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, khususnya sumur-sumur bor yang berada dalam wilayah dalam cakupan pelayanan PAM Kota Bandung.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikabupaten Bandung, dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, mencoba untuk memberikan gambaran mengenai besarnya potensi Pajak daerah dan beberapa retribusi daerah yang kontribusinya dapat diharapkan. Data utama yang digunakan adalah data sekunder, tentang pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (laporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2011 dengan tahun 2012).

Analisis data dengan menggunakan: ratio pertumbuhan, ratio tambahan, proporsi, sedangkan untuk menentukan klasifikasi jenis pajak atau retribusi digunakan hubungan ratio-ratio dalam tabel :

Tabel 3. 1 Rumus untuk Klasifikasi Jenis Pajak atau Retribusi Daerah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ratio Proporsi**  **Ratio Tambahan** | **X/rerata >1** | **X / rerata <1** |
| X1 / X2 >1 | Prima | Berkembang |
| X1 / X2 <1 | Potensial | Terbelakang |

**Keterangan:**

1. Ratio Proporsi merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak atau retribusi dengan Rerata pajak atau retribusi.

***Rumus:***



1. Ratio Tambahan (Pertambahan pertumbuhan) adalah perbandingan antara pertumbuhan ayat pajak / retribusi dengan pertumbuhan total pajak / retribusi,



***Dimana:***



Dimana: Pajak / ret. Xi = Pajak/Ret. Tahun ini (2003)

Pajak / Ret. X(i-i)= Pajak / Ret. Tahuhn llau (2002)

Peramalan dapat menggunakan teknik-teknik peramalan yang bersifat formal maupun informal. Sistem peramalan memiliki sembilan langkah yang harus diperhatikan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi. Langkah¬langkah tersebut termasuk dalam manajemen permintaan yang disebut juga sebagai konsep dasar sistem peramalan, yaitu (Gaspersz 2004):

1. Menentukan tujuan dari peramalan.
2. Memilih item independent demand yang akan diramalkan.
3. Menentukan horison waktu dari peramalan (jangka pendek, menengah, dan panjang).
4. Memilih model-model peramalan.
5. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan.
6. Validasi model peramalan.
7. Membuat peramalan.
8. Implementasi hasil-hasil peramalan.
9. Memantau keandalan hasil peramalan.

Penyelesaian peramalan memiliki beberapa metode yang umum seperti metode weight moving average, exponential smoothing, dan regresi linier. Dalam studi ini metode peramalan yang digunakan adalah metode *weight moving average*.

Model rata-rata begerak terbobot lebih responsif terhadap perubahan, karena data dari periode yang baru biasanya diberi bobot lebih besar. Suatu model rata-rata bergerak n-periode terbobot, weighted MA(n), dinyatakan sebagai berikut:

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana keandalan dari model peramalan weighted moving average (WMA), maka diharuskan untuk membuat peta kontrol *tracking signal*. Untuk perhitungan *tracking signal* adalah sebagai berikut:

Cara untuk bisa mendapatkan nilai tracking signal harus dicari terlebih dahulu nilai MAD yang didapat dari rumus matematis adalah sebagai berikut (Gaspersz 2004).

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber dari instansi BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah) Pemerintah Kota Bandung, BPS Pemerintah Kota Bandung, PAM Kota Bandung, dan berbagai peraturan perundangan terkait pengelolaan air tanah yang tersedia di internet. Data penelitian dikumpulkan dengan metode observasi dokumen

# **BAB IV RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG**

Pembangunan Kota Bandung sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkeseimbangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota.

Perkembangan kota yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan. Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan­tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Bandung ke arah yang semakin tidak terkendali.

## Profil Wilayah Kota

Kota Bandung adalah ibukota Pemerintah Jawa Barat dengan luas 16.729,65 ha. Kota ini merupakan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 675 – 1050 meter di atas permukaan laut, yang berada pada koordinat 6° 50’ 38” - 6° 58’ 50” LS dan 107° 33’ 34” - 107° 43’ 50” BT. Bentuk bentangan alam Kota Bandung merupakan cekungan dengan morfologi perbukitan di bagian Utara dan dataran di bagian Selatan. Kota Bandung termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional. DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Secara geografis, jarak Kota Bandung yang relatif dekat dengan Jakarta sebagai ibukota Negara dan pusat perdagangan, menjadikan Kota Bandung berkembang pesat di berbagai bidang kegiatan pembangunan.

Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang. Kawasan Cekungan Bandung dikelilingi oleh Gunung Tangkuban Perahu (Kabupaten Bandung Barat dan Subang) dan Gunung Manglayang (Kabupaten Sumedang) di sebelah Utara; Gunung Bukit Jarian, Gunung Mandalawangi dan Gunung Kasur (Kabupaten Sumedang) di sebelah Timur; Gunung Puntang, Gunung Malabar, Gunung Rakutak dan Gunung Bubut (Kabupaten Bandung) di sebelah Selatan; dan Bukit Kidang Pananjung, Gunung Lagadar dan Gunung Bohong (Kota Cimahi).

_Pic8

## Kedudukan Kota Bandung dalam Wilayah yang Lebih Luas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bandung ditetapkan dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. PKN ini terdiri dari Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kota inti dan sebagian Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang. Dalam RTRW tersebut PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya termasuk dalam tahap pembangunan I, dengan arahan kegiatan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota yang telah berfungsi.

Dalam RTRWN, Kota Bandung merupakan bagian dari kawasan strategis nasional berdasarkan pertimbangan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Selain itu, Kota Bandung juga ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional. Nilai strategis nasional yang dimaksud meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

Dalam sistem perkotaan RTRWP Jawa Barat, Kota Bandung termasuk dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Metropolitan Bandung adalah Kota Bandung, kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang yang berbatasan dengan Kota Bandung. Di dalam PKN Metropolitan Bandung, tidak semua kota berada pada hirarki kota yang sama, terdapat perbedaan skala pelayanan. Hirarki kota PKN Metropolitan Bandung adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini, Kota Bandung sebagai kota inti dari PKN ini ditetapkan sebagai kota orde I.

Dalam sistem perkotaan RTRWP Jawa Barat, Kota Bandung termasuk dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Metropolitan Bandung adalah Kota Bandung, kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang yang berbatasan dengan Kota Bandung. Di dalam PKN Metropolitan Bandung, tidak semua kota berada pada hirarki kota yang sama, terdapat perbedaan skala pelayanan. Hirarki kota PKN Metropolitan Bandung adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini, Kota Bandung sebagai kota inti dari PKN ini ditetapkan sebagai kota orde I.

Tabel 4. 1 Hirarki Kota PKN Metropolitan Bandung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PKN*** | ***Kota Orde I*** | ***Kota Orde II*** | ***Kota Orde III*** |
| **Kawasan Perkotaan Metro**  **Bandung** | Kota Bandung |  |  |
|  | Soreang | * Ciwidey * Banjaran * Majalaya * Ciparay * Cicalengka * Rancaekek * Cilengkrang |
|  | Ngamprah | * Cililin * Padalarang * Cisarua * Lembang |
| Cimahi |  |  |
|  | Tanjungsari |  |

Sumber: Buku Rancangan RTRWP Jawa Barat, 2008

Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung adalah salah satu dari enam wilayah pengembangan Jawa Barat yang meliputi Bodebekpunjur dan sekitarnya, Purwasuka, Cekungan Bandung, Ciayumajakuning, Priangan Timur dan Pangandaran, serta Sukabumi dan sekitarnya. Wilayah pengembangan ini meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang. Terdapat lima kecamatan di Kabupaten Sumedang yang masuk ke dalam WP Cekungan Bandung, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan.

Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. Kegiatan ekonomi di Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara dan sampah. Dalam hal ini kegiatan ekonomi utama difokuskan pada perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan perkotaan. Wilayah pengembangan ini juga diarahkan sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan.

Infrastruktur strategis yang direncanakan dikembangkan dalam wilayah pengembangan ini antara lain Bandar Udara Husein Sastranegara, permukiman vertikal, Tempat Pengolahan Akhir Sampah Sari Mukti, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Legok Nangka, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Leuwigajah. Fokus pengembangan kegiatan utama Kota Bandung dalam wilayah pengembangan ini adalah perdagangan dan jasa, industri kreatif dan *high-tech*, pariwisata, dan transportasi.

## Wilayah Administrasi

Secara administratif, menurut Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, wilayah Kota Bandung terbagi menjadi:

* 1. 30 kecamatan, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat;
  2. 151 kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Lurah;
  3. 1.558 Rukun Warga (RW) yang masing-masing diketuai oleh seorang Ketua RW (data tahun 2007); dan
  4. 9.678 Rukun Tetangga (RT), yang masing-masing dikepalai oleh seorang Ketua RT (data tahun 2007).

Tabel 4. 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung

| **No.** | **Kecamatan** | **Kelurahan** | **No.** | **Kecamatan** | **Kelurahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sukasari | Isola  Sukarasa Gegerkalong Sarijadi | 16. | Regol | Cigereleng Ancol  Pungkur  Balonggede Ciseureuh Ciateul  Pasirluyu |
| 2. | Sukajadi | Pasteur  Cipedes  Sukawarna Sukagalih  Sukabungah | 17. | Lengkong | Cijagra  Lingkar Selatan Burangrang Paledang Turangga Malabar Cikawao |
| 3. | Cicendo | Husein Sastranegara Arjuna  Pajajaran  Pasirkaliki  Pamoyanan  Sukaraja | 18. | Batununggal | Gumuruh  Maleer Cibangkong  Kacapiring  Kebon Waru  Kebon Gedang  Sam oja Binong |
| 4. | Andir | Maleber  Dungucariang Ciroyom  Kebon Jeruk Garuda  Campaka | 19. | Kiaracondong | Sukapura  Kebon Jayanti  Babakan Surabaya Cicaheum  Babakan Sari  Kebon Kangkung |
| 5. | Cidadap | Hegarmanah Ciumbuleuit Ledeng | 20. | Arcamanik | Sukamiskin  Cisaranten Bina Harapan  Cisaranten Kulon Cisaranten Endah |
| 6. | Coblong | Cipaganti  Lebak Gede  Sadang Serang Dago  Sekeloa  Lebak Siliwangi | 21. | Cibiru | Cipadung Pasir Biru Cisurupan Palasari |
| 7. | Bandung Wetan | Cihapit  Taman Sari Citarum | 22. | Antapani | Antapani Wetan Antapani Tengah Antapani Kulon Antapani Kidul |
| 8. | Sumur Bandung | Braga  Merdeka  Kebon Pisang  Babakan Ciamis | 23. | Ujung Berung | Pasir Endah Cigending  Pasir Wangi Pasir Jati |
|  |  |  |  |  | Pasanggrahan |
| 9. | Cibeunying Kaler | Cihaurgeulis  Sukaluyu Neglasari Cigadung | 24. | Rancasari | Cipamokolan Manjahlega Derwati  Mekar Jaya |
| 10. | Cibeunying Kidul | Padasuka Cikutra  Cicadas  Sukamaju Sukapada Pasirlayung | 25. | Buahbatu | Sekejati  Margasari Cijawura Jatisari |
| 11. | Astanaanyar | Karasak Nyengseret  Karang Anyar  Panjunan Cibadak Pelindung Hewan | 26. | Bandung Kidul | Batununggal Wates  Mengger  Kujangsari |
| 12. | Bojongloa Kaler | Kopo  Babakan Tarogong Jamika  Babakan Asih  Sukaasih | 27. | Pantileukan | Cipadung Kulon Cipadung Wetan Cipadung Kidul Mekar Mulya |
| 13. | Babakan Ciparay | Babakan  Babakan Ciparay Sukahaji  Margahayu Utara Margasuka  Cirangrang | 28. | Gedebage | Ranca Bolang Cisaranten Kidul Cimincrang Rancanumpang |
| 14. | Bojongloa Kidul | Situsaeur  Kebon Lega  Cibaduyut  MekarWangi  Cibaduyut Kidul Cibaduyut Wetan | 29. | Mandalajati | Jati Handap Karang Pamulang Sindang Jaya Pasir Impun |
| 15. | Bandung Kulon | Cijerah  Cibuntu  Warung Muncang Caringin  Cigondewah Kaler Gem pol Sari  Cigondewah Rahayu Cigondewah Kidul | 30. | Cinambo | Cisaranten Wetan Pakemitan  Sukamulya  Babakan Penghulu |

Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 8 (delapan) subwilayah kota yang dilayani oleh 2 (dua) pusat pelayanan kota dan 8 (delapan) subpusat pelayanan (SP). Pusat pelayanan kota melayani 2 juta penduduk, sedangkan subpusat pelayanan kota melayani sekitar 500.000 penduduk. Pembagian pusat pelayanan di Kota Bandung adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Pembagian Wilayah Kota Bandung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pusat Pelayanan Alun-Alun** | | |
| **Subpusat pelayanan Setrasari** | | **Subpusat pelayanan Sadang Serang** | |
| • | Kecamatan Andir | • | Kecamatan Cidadap |
| • | Kecamatan Sukasari | • | Kecamatan Coblong |
| • | Kecamatan Cicendo | • | Kecamatan Bandung Wetan |
| • | Kecamatan Sukajadi | • | Kecamatan Cibeunying Kidul |
|  |  | • | Kecamatan Cibeunying Kaler |
|  |  | • | Kecamatan Sumur Bandung |

|  |  |
| --- | --- |
| **Subpusat pelayanan Kopo Kencana** | **Subpusat pelayanan Turangga** |
| * Kecamatan Astana Anyar * Kecamatan Bojongloa Kidul * Kecamatan Bojongloa Kaler * Kecamatan Babakan Ciparay * Kecamatan Bandung Kulon | * Kecamatan Regol * Kecamatan Lengkong * Kecamatan Batununggal * Kecamatan Kiaracondong |
| **Pusat Pelayanan Gedebage** | |
| **Subpusat pelayanan Arcamanik** | **Subpusat pelayanan Ujungberung** |
| * Kecamatan Arcamanik * Kecamatan Mandalajati * Kecamatan Antapani | * Kecamatan Ujungberung * Kecamatan Cibiru * Kecamatan Cinambo * Kecamatan Panyileukan |
| **Subpusat pelayanan Kordon** | **Subpusat pelayanan Derwati** |
| * Kecamatan Bandung Kidul * Kecamatan Buahbatu | * Kecamatan Gedebage * Kecamatan Rancasari |

Sum ber: Hasil Analisis, 2009

Secara geografis, wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai dengan aliran dari utara ke selatan yaitu Sungai Cikapundung, dan dari selatan ke utara yaitu Sungai Citarum. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK. Potensi air lainnya adalah sumber air tanah yang diambil melalui sumur bor yang tersebar di Kota Bandung.

Kota Bandung memiliki tanah yang relatif subur karena terdiri dari lapisan tanah aluvial dan endapan sungai dan danau. Kesuburan tanah ini dapat berarti kekuatan jika kegiatan perkotaan akan lebih didominasi agro atau *urban forestry*, tetapi sebaliknya akan menjadi kelemahan jika lahan itu justru didominasi oleh pemanfaatan untuk pengadaan blok-blok bangunan.

## Guna Lahan

Pada saat ini Kota Bandung yang digunakan sebagai lahan terbangun yang cukup padat terutama di bagian pusat kota (sebesar 73,5%) sehingga memaksa perlu adanya pengembangan fisik kota ke wilayah pinggiran. Perkembangan fisik kota ini di antaranya diperuntukkan bagi perumahan dengan fasilitas penunjangnya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh M. Hilman (2004), pada tahun 1968, penggunaan lahan terbesar di Kota Bandung adalah sawah seluas 3.340,81 ha (41,2%), perumahan seluas 2.181,62 ha (26,9%) dan penggunaan tanah terkecil adalah gudang seluas 22,35 ha. Pada tahun 1981, luas penggunaan lahan terbesar adalah perumahan sebesar 2.264,613 ha atau dua kali lipat penggunaan lahan perumahan tahun 1968. Pertambahan lainnya adalah kawasan militer sebesar 487,18 ha, perdagangan sebesar 189,388 ha. Luas penggunaan lahan yang berkurang adalah sawah sebesar 2.20 1,466 ha, industri sebesar 73,124 ha. Pada tahun 1997 guna lahan di Kota Bandung didominasi oleh perumahan 9.445,72 ha (56,46%), pemerintahan/sosial 1.234,88 ha (2,38%), militer 348,52 (2,08%), perdagangan 448,07 ha (2,68%), industri 635,28 ha (3,8%), sawah 3.649,29 ha (21,81%), tegalan 876,37 ha (5,04%), lain-lain 91,87 ha (0,55%).

Berdasarkan peta interpretasi citra satelit Tahun 2004 (Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Jawa Barat, penggunaan lahan Kota Bandung pada tahun 2004 terdiri atas bandara 106,47 ha, belukar 164,15 ha, hutan 21,05 ha. Untuk penggunaan industri dan institusi masing-masing 903,29 ha dan 906,98 ha. Untuk Jalan dan rel kereta 997,4 dan 16,56 ha. Penggunaan lahan kebun campuran mencapai 515,69 ha, pasar/pertokoan 52,90 ha, perkebunan/kebun 48,76 ha dan penggunaan lahan paling luas untuk perumahan yang mencapai 8.922,00 ha.

Pada tahun 2008, sebagian besar lahan di Kota Bandung (55,5%) digunakan sebagai lahan perumahan. Penggunaan untuk kegiatan-kegiatan jasa sekitar 10% dan masih ada lahan sawah sekitar 20,1%.

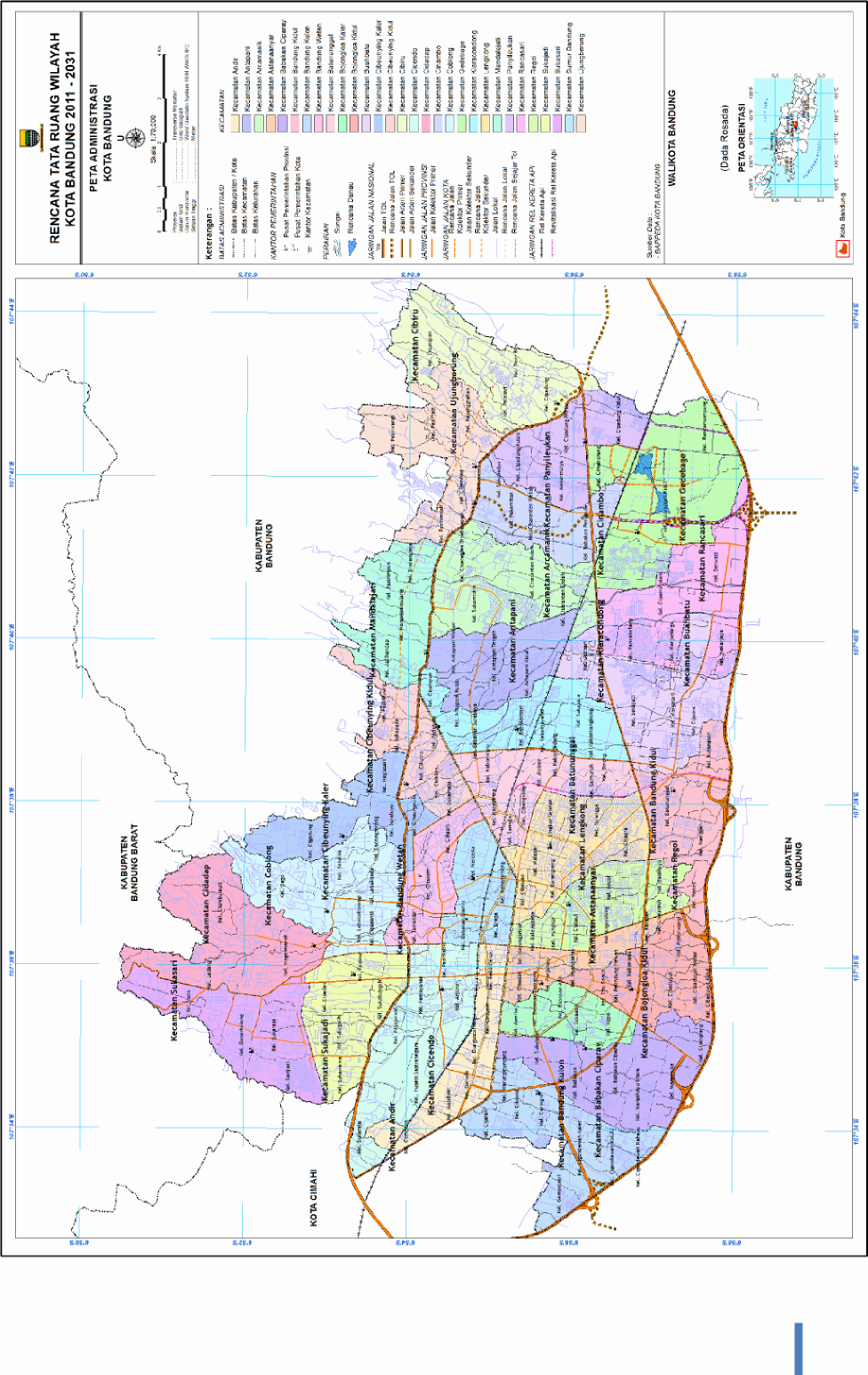
Tabel 4. 4 Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2008

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Guna Lahan** | **Luas Area (Ha)** |
|  | Perumahan | 9.290,28 |
|  | Jasa | 1.668,54 |
|  | Industri | 647,83 |
|  | Sawah | 3.354,49 |
|  | Tegalan | 31 8,70 |
|  | Kebun Campuran | 215,57 |
|  | Tanah Kosong | 545,47 |
|  | Kolam | 39,90 |
|  | Lainnya | 649,22 |
| **Jumlah** | | **16.730,00** |

Sumber: Badan Pertanahan Kota Bandung, 2008

Banyaknya jenis kegiatan yang berjalan di Kota bandung, terjadinya perubahan pemanfaatan ruang, terdapatnya permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya lahan untuk Tempat Permakaman Umum dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal pada akhirnya memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kota Bandung. Berbagai masalah lingkungan muncul di antaranya; penurunan air tanah, penurunan kualitas air tanah, suhu udara yang semakin meningkat, kualitas udara menurun, masalah sampah yang belum dapat ditangani secara optimal, luas lahan terbuka yang berfungsi lindung sangat sedikit dan terancam keberadaannya, ketidakseimbangan kegiatan antar wilayah dan lain sebagainya.

Pada situasi menghadapi berbagai masalah fisik alam tersebut, tuntutan kebutuhan air bersih, kualitas udara yang baik, kenyamanan, ruang terbuka hijau, ketuntasan penanganan sampah, kebutuhan pemukiman, sarana dan prasarana semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Permasalahan lingkungan fisik alam tersebut pada dasarnya bukan hanya tantangan Kota Bandung saja, namun juga meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Permasalahan di salah satu wilayah tersebut dapat membawa dampak pada wilayah lainnya. Karena itu untuk penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan di Kota Bandung memerlukan sinergitas dengan Kabupaten-Kota di sekitarnya.



## Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kota Bandung Tahun 2008, jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2008 mencapai 2.335.406 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun pada tahun 2006-2008 adalah 0,8 %. Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk pada tahun 2031 diperkirakan mencapai 4.1 juta jiwa. Angka proyeksi tersebut merupakan angka jumlah penduduk dengan pertumbuhan alami tanpa adanya intervensi apapun. Pada tahun 2008, Kecamatan Bandung Kulon memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 364 jiwa/ha.

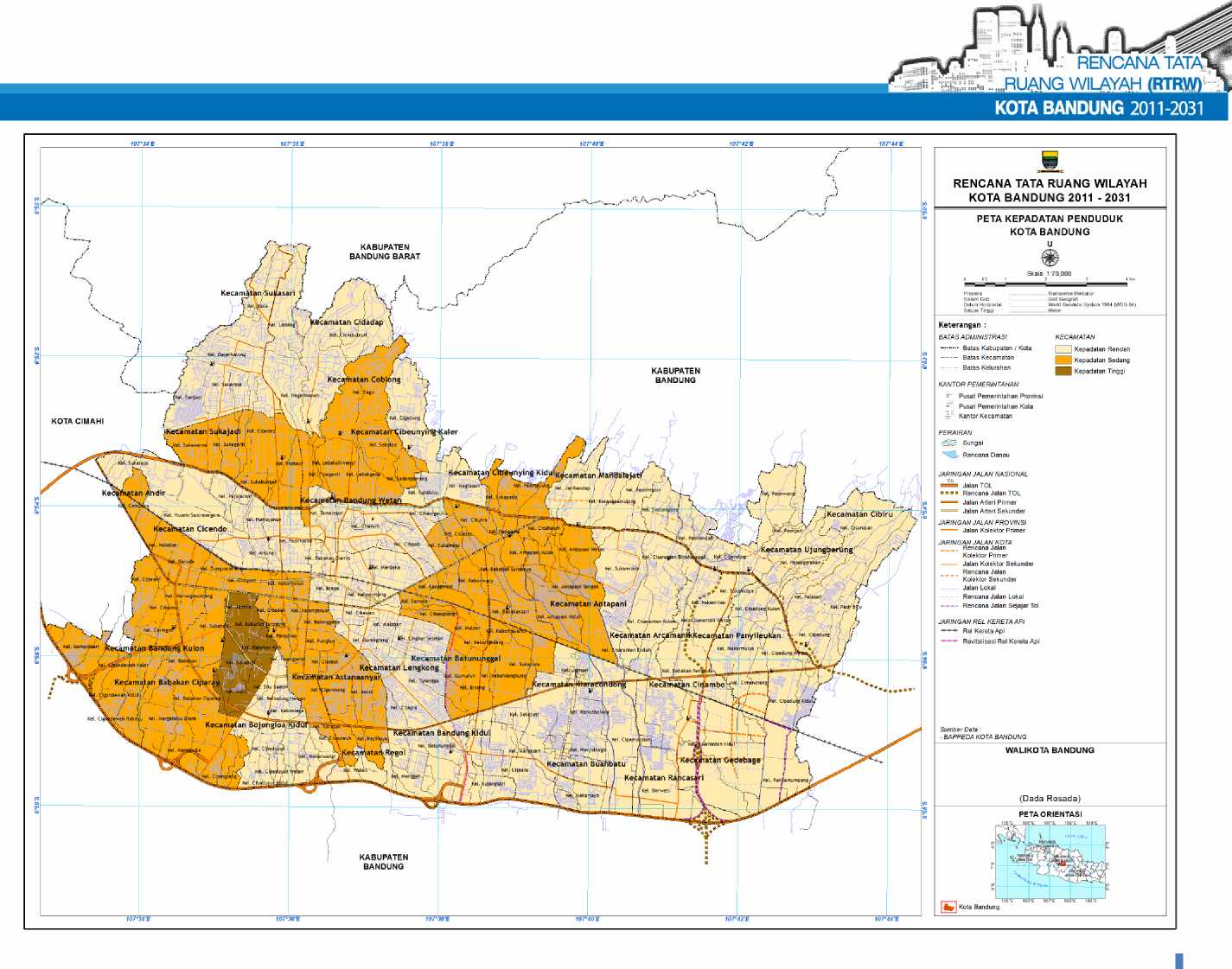
Tabel 4. 5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung 1990-2008

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **JumlahPenduduk** | **LPP(%)** |
| 1990 | 1.808.261 |  |
| 1991 | 1.808.765 | 0,03 |
| 1992 | 1.816.626 | 0,43 |
| 1993 | 1.819.356 | 0,15 |
| 1994 | 1.816.385 | -0,16 |
| 1995 | 1.816.726 | 0,02 |
| 1996 | 1.817.939 | 0,07 |
| 1997 | 1.818.694 | 0,04 |
| 1998 | 1.806.409 | -0,68 |
| 1999 | 1.868.913 | 3,46 |
| 2000 | 2.141.837 | 14,30 |
| 2001 | 2.146.360 | 0,47 |
| 2002 | 2.142.194 | -0,16 |
| 2003 | 2.228.268 | 3,98 |
| 2004 | 2.234.624 | 0,20 |
| 2005 | 2.266.969 | 1,72 |
| 2006 | 2.296.848 | 1,72 |
| 2007 | 2.329929 | 1,14 |
| 2008 | 2.335.406 | 1,88 |

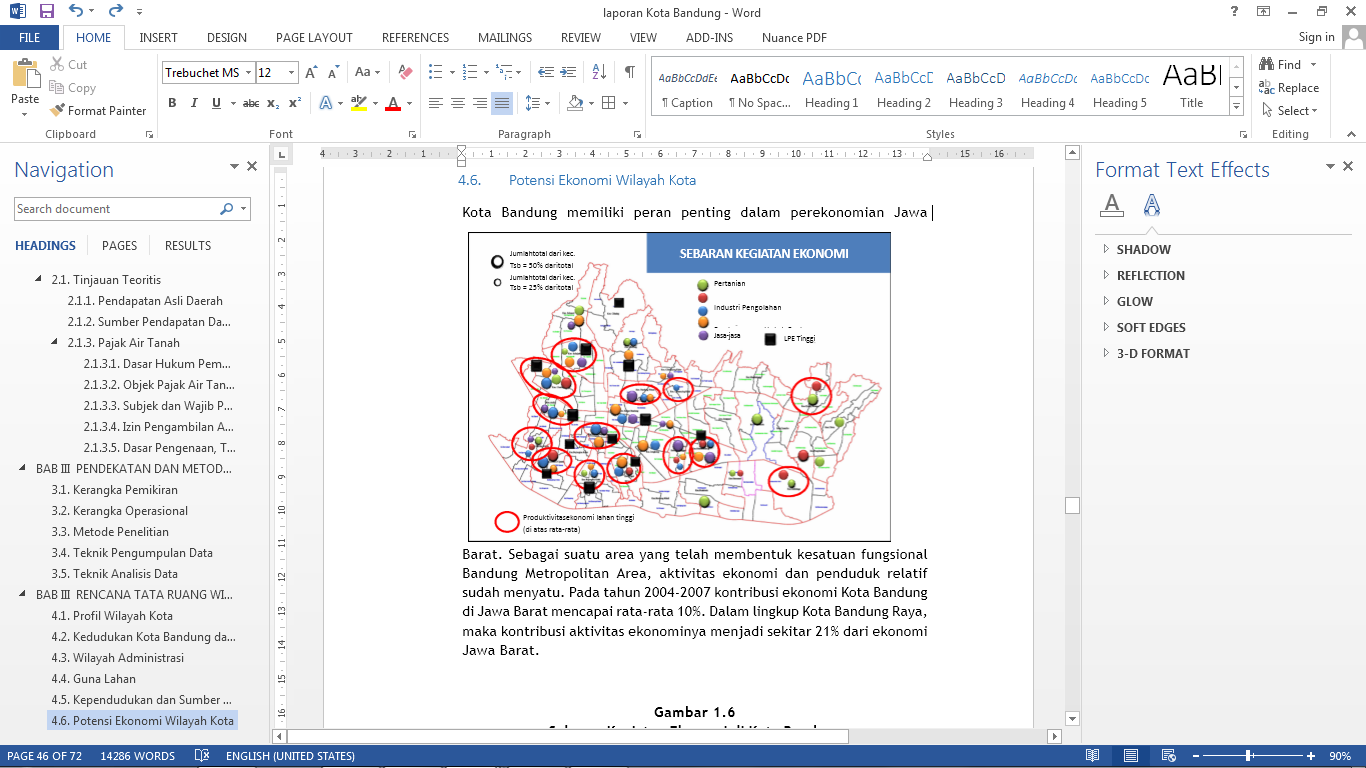
Sumber: Dinas Kependudukan, 2008; dan BPS Kota Bandung, 2005

Berdasarkan hasil kajian Cekungan Bandung, daya dukung dan tampung ruang Kota Bandung maksimum sebesar 3.018.038 jiwa dengan kepadatan 200 jiwa/ha. Dalam RTRW Kota Bandung 2004- 2013, jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2013 diperkirakan sudah mencapai batas maksimal daya tampung ruang Cekungan Bandung. Pada tahun 2031 mendatang jumlah penduduk Kota Bandung diperkirakan akan mencapai sekitar 4.1 juta jiwa. Berdasarkan kecenderungan ini, maka strategi penyebaran penduduk dengan pendistribusian sarana dan prasarana di Kota Bandung ke kawasan perkotaan Bandung Raya menjadi penting untuk mengurangi berbagai persoalan di Kota Bandung.

Semua Kecamatan di Kota Bandung memiliki sex ratio lebih dari 100, hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 (dibulatkan dari 105,80) penduduk laki-laki. Angka sex ratio tertinggi berada pada Kecamatan Sumur Bandung dan Antapani. Angka ini menyebabkan kebutuhan lapangan pekerjaan untuk laki-laki lebih besar. Jika hal ini tidak diakomodasi dengan baik, maka akan berdampak banyaknya penduduk yang bekerja di luar kecamatan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan baru.



## Potensi Ekonomi Wilayah Kota



Gambar 4. 1 Sebaran Kegiatan Ekonomi di Kota Bandung

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai suatu area yang telah membentuk kesatuan fungsional Bandung Metropolitan Area, aktivitas ekonomi dan penduduk relatif sudah menyatu. Pada tahun 2004-2007 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 10%. Dalam lingkup Kota Bandung Raya, maka kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 21% dari ekonomi Jawa Barat.

Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Hal ini menyebabkan Kota Bandung menjadi pusat kegiatan bukan hanya bagi penduduk setempat tetapi juga penduduk di daerah sekitarnya. Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang, terlibat dalam sektor perdagangan baik formal maupun informal terutama sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL)

## Sistem Penyediaan Air Minum

Pada tahun 2009, kapasitas produksi dari PDAM rata-rata sebesar 2.496 liter/detik dengan kebutuhan 4.414 liter/detik sehingga masih defisit 1.918 liter/detik. Jaringan air bersih baru melayani 53% penduduk dengan pengaliran kontinyu 24 jam, dan dengan tingkat kebocoran air bersih rata-rata 47%. Kebutuhan air minum pada tahun 2031 dengan standar 145 liter/orang/hari memerlukan kapasitas air minum sebesar 7.765 liter/detik, sehingga masih harus ditambah kapasitas sebesar 5.269 liter/detik.

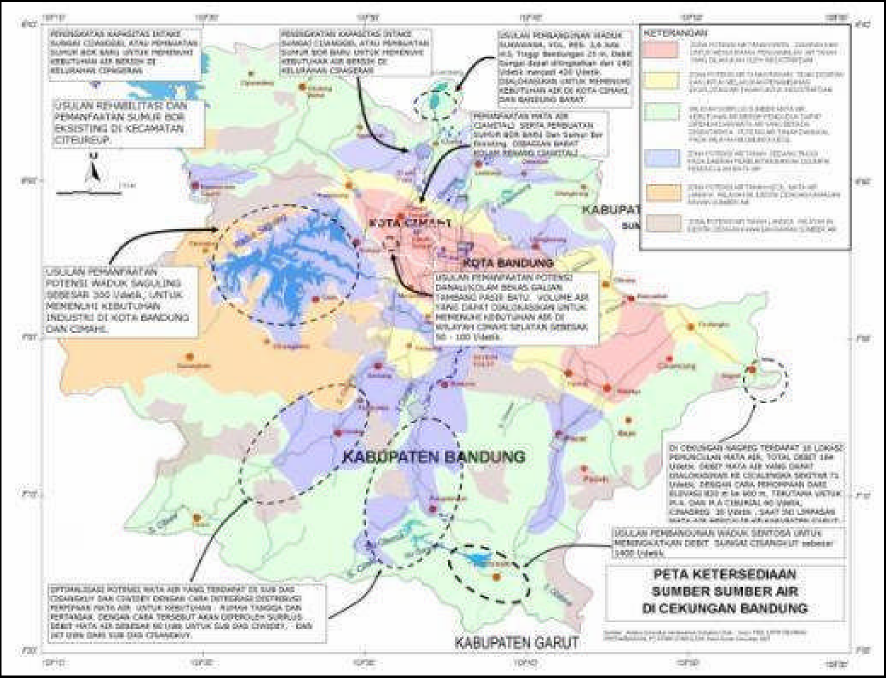
Proyeksi kebutuhan air bersih domestik Kota Bandung 2009-2031 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Domestik di Kota Bandung 2009-2031

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Penduduk Menurut Proyeksi (jiwa)** | **Air Bersih** | | |
| **l/orang/hari** | **l/hari** | **l/detik** |
| 2009 | 2.761.184 | 120 | 331.342.080 | 3.835 |
| 2010 | 2.824.616 | 120 | 338.953.920 | 3.923 |
| 2015 | 3.141.776 | 125 | 392.722.000 | 4.545 |
| 2020 | 3.458.936 | 130 | 449.661.680 | 5.204 |
| 2025 | 3.776.096 | 140 | 528.653.440 | 6.119 |
| 2031 | 4.093.256 | 145 | 593.522.120 | 6.869 |

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Kebutuhan air minum akan dipenuhi dari sumber air baku dari air tanah, air sungai, dan waduk. Jaringan penyediaan air minum terpadu dengan sistem jaringan air minum di wilayah Cekungan Bandung.



Tabel 4. 7 Ketersediaan Air dan Rencana Pengembangan Sumber Air Baku Di Cekungan Bandung

Berdasarkan data perkiraan diperoleh pasokan air bersih sebesar 5.270 l/detik, sementara tambahan kebutuhan air bersih hingga tahun 2031 sebesar 5.269 l/detik. Dengan demikian bila alternatif di atas dapat direalisasikan serta upaya penghematan air dan pengurangan tingkat kebocoran, maka kebutuhan air bersih hingga 2031 dapat terpenuhi.

Selain itu program pengembangan air baku pada tahun 2004-2013 yang belum terealisasi juga dapat menjadi alternatif pengembangan yang dapat direalisasikan pada tahun 2011- 2031 tentunya dengan studi yang lebih dalam.

# **BAB V ANALISIS BESARAN PAJAK AIR TANAH**

## Penerimaan Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak daerah. Ketentuan tentang pajak air tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (pasal 1 ayat 33) dan termasuk jenis pajak kabupaten/kota (pasal 2 ayat 2). Ketentuan tentang pajak air tanah diatur dalam pasal 67 sampai 71.

Pengertian operasional pajak air tanah adalah biaya yang harus dibayarkan setiap bulan oleh subjek pemakai untuk setiap meter kubik pengambilan air tanah. Jumlah pemakaian air tanah per bulan tertera dalam alat pencatat meter (meteran air), seperti lazim digunakan oleh pelanggan air PAM atau PDAM. Petugas pencatat air akan datang setiap bulan mencatat pemakaian air selama satu bulan, tagihan pemakaian air pada bulan tersebut akan jatuh tempo dua bulan selanjutnya. Pajak air tanah dihitung dengan rumus:

Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditetapkan dengan peraturan daerah (pasal 70 ayat 2). Tarif pajak tersebut tidak berbeda dengan ketentuan pada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan pajak air tanah Kota Bandung pada tahun 2012 diperoleh sebesar Rp. 3,47 miliar sedangkan target yang ditetapkanya hanya sebesar Rp. 2,5 miliar.

Tabel realisai Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bandung 2010-2012

(dalam ribuan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pajak Air Bawah Tanah** | |
| **Target** | **Realisasi** |
| 2012 | 2.500.000 | 3.471.182 |
| 2011 | 2.147.993 | 3.471.182 |
| 2010 | 1.270.415 | 3.530.415 |

Sumber : BPS Kota Bandung 2012

Jika melihat dari objek pajak yang potensial di Kota Bandung terdiri dari :

* + 1. Industri
    2. Hotel dan restoran
    3. Pusat perbelanjaan
    4. Institusi/perkantoran
    5. Perumahan yang menggunakan artesis
    6. Rumah Sakit

Mengacu kepada hal tesebut, maka sudah sewajarnya bahwa penerimaan pendapata asli daerah dari sektor pajak air tanah bisa dioptimalkan lagi, mengingat dari tahun 2010-2012 terjadi peningkatan dalam kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

## Proyeksi Penerimaan Pajak Air Tanah

Untuk meng optimalkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Air Tanah, maka harus dilakukan peramalan dalam rangka memberikan gambaran mengenai kondisi yang akan datang.

Dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan sebelumnya, diperolehlah hasil peramalan untuk penerimaan sektor pajak air tanah adalah sebagai berikut :

Tabel Proyeksi Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bandung   
Tahun 2013-2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Proyeksi** |
| 2013 | 3.431.694 |
| 2014 | 3.402.077 |
| 2015 | 3.372.461 |
| 2016 | 3.342.844 |
| 2017 | 3.313.228 |
| 2018 | 3.283.612 |
| 2019 | 3.253.995 |
| 2020 | 3.224.379 |

Sumber : Data BPS Kota Bandung diolah

Berdassarkan kepada tabel diatas, perolehan pajak air tanah Kota Bandung cenderung menurun, dengan asumsi tidak adanya perubahan kebijakan tarif yang ditetapkan, hal itu terkait dengan kualitas dan kuantitas air tanah yang semakin berkurang. Oleh karena itu dalam upaya untuk mengoptimalkan sumber penerimaan pajak air tanah Kota Bandung, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penertiban sumur-sumur pompa yang tidak memiliki izin, selain itu juga harus diberikan sanksi yang cukup tegas, agar memberikan efek jera.

# **BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

## Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Bandung hanya menggunakan pajak dan retribusi air tanah sebagai kebijakan untuk membatasi pemakaian dan pemanfaatan air tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pajak air tanah adalah pajak daerah. Kontribusi pajak dan retribusi air tanah terhadap pendapatan asli daerah sangat kecil dibandingkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang lain. Fungsi instrumen pajak dan retribusi air tanah adalah pembatasan pemakaian dan konservasi air tanah.
2. Metode perhitungan harga air baku dalam penentuan nilai perolehan air tanah (NPA) di Pemerintah Kota Bandung yang didasarkan pada Lampiran 10 Keputuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14551 Tahun 2000 perlu direvisi karena belum sesuai dengan teori penetapan harga air tanah yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu ekonomi sumberdaya dan lingkungan. Jika mengacu pada lampiran tersebut, penetapan harga air baku menjadi lebih rendah dari harga semestinya, implikasi selanjutnya kemungkinan bisa menyebabkan deplesi air tanah lebih cepat.
3. Kenaikan pajak air tanah yang dilakukan dengan cara menaikkan NPA efektif menurunkan pemakaian air tanah sumur-sumur di dalam jangkauan pelayanan PAM, sebaliknya tidak efektif untuk sumur-sumur diluar jangkauan pelayanan PAM.
4. Biaya perolehan air tanah setelah ditetapkannya NPA yang baru (tahun 2009) lebih besar dibandingkan dengan biaya perolehan air PAM untuk semua kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian. Sebelum kenaikan NPA biaya perolehan air tanah lebih rendah dibandingkan air bersih yang disediakan PAM DKI Jakarta.

## Rekomendai

Untuk mengoptimalkan keberadaan sumberdaya alam yang dimiliki, dalam hal ini air tanah, maka sebaiknya pemerintah Kota Bandung mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

* 1. Melakukan efisiensi dalam penggunaan air tanah, dan menjaga kelestarian alam
  2. Dalam upaya meningkatkan kontribusi penerimaan daerah, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti metode penetapan Nilai Perolehan Air (NPA)
  3. Menetapkan tarif baru dan disesuaikan dengan target yangb telah ditetapkan oleh pemerintah.